

193

Pengertian Nasionalisme Menurut Bung Hatta*

H. Rosihan ANWAR

Diskusi panel itu bertema "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa dewasa ini demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa." Penyelenggaranya, Yayasan Prasetya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia. Tujuan diskusi di antaranya ialah memperoleh kejelasan mengenai nasionalisme Indonesia sebagai pancaran dari Pancasila dan UUD 1945; memantapkan peran-serta dunia usaha dalam pembentukan bangsa dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tulisan ini dibuat setelah mendengarkan buah pikiran berharga dari pembicara terkemuka dan setelah menyimak isi makalah-makalah yang disajikan.

KERINDUAN AKAN NASIONALISME

Beberapa kutipan berbunyi sebagai berikut: "Walaupun konsep kebangsaan kita tidak mengenal bentuk-bentuk diskriminasi, tidak mengenal mayoritas-minoritas, tidak dilandasi oleh konotasi etnis, namun berkali-kali kita mengalami sikap serta tindakan yang rasialistis, menumbuhkan perasaan dan pengertian pembedaan antara "pribumi" dan "nonpribumi," antara asing dan asli. Masih lagi semua ini tidak jarang terkait dengan kenyataan, bahwa sebagian besar keturunan Cina itu hidup dari sektor ekonomi. Maka tiupan isu pribumi dan nonpribumi itu langsung saja dikaitkan dengan letupan isu kaya-miskin, walaupun dalam kenyataannya tidak semua keturunan Cina itu adalah kaya dan tidak semua yang lainnya adalah miskin, tidak semua keturunan Cina adalah berekonomi kuat dan tidak semua lainnya itu berekonomi lemah" (kata Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam).

*Karangan ini pernah dimuat dalam harian *Kompas*, 20 November 1984.

menyediakan manajemen dan Matari Advertising menyediakan disain produk dan pemasarannya.

Penyuluhan dilakukan dengan cara memesan barang-barang sambil mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produsen. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, produsen dengan sendirinya akan terbina dalam perencanaan produksi, pembukuan, disain, dan kualitasnya. Fihak pengusaha yang membantu menggunakan kekuatan modalnya dengan cara membeli barang-barang produksi industri di Batur sambil mengatur. Proyek ini berhasil baik.

Sebelum ini, ada beberapa pengusaha kerajinan besi di Batur yang bangkrut justru setelah menang tender, karena salah membuat voorkalkulasi.

Sayang bahwa proyek-proyek semacam ini tidak diikuti oleh yang lain. Kasus ini dikemukakan sebagai contoh konkret dari upaya pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbisnis dari industri tradisional di daerah sekitarnya tanpa pamrih sama sekali, karena sifat industri yang dibantu, yang sama sekali tidak ada kaitan bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan yang membantu.

PERUSAHAAN BESAR SEBAGAI PENGAYOM DAN PENYALUR BANYAK PERUSAHAAN KECIL

Model ini banyak dilakukan di Jepang oleh Shogo Shosha, namun di Indonesia belum ada contohnya yang menonjol, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa secara tidak diketahui oleh banyak orang, sudah ada yang menjalankannya.

Dasar pemikirannya adalah produksi dari barang dengan merek tertentu dan spesifikasi kualitas tertentu yang standar dan uniform, dan yang produksinya tidak dilakukan oleh satu pabrik besar, melainkan dilakukan oleh beratus-ratus rumah tangga atau kelompok-kelompok kecil. KEPOLITAIAN KEPADA nya diberikan bahan baku dan bahan penolongnya, dan seluruh produksi dibeli oleh perusahaan yang memasarkannya dengan seluruh jalur distribusi yang dimilikinya. Dengan demikian, perusahaan distribusi ini tidak perlu memiliki pabrik sendiri, karena produksi bisa dilakukan oleh para pengrajin kecil di rumahnya sendiri-sendiri. Konsumen dijamin kualitasnya dengan suplai bahan baku dan pengawasan kualitas yang ketat oleh distributor pemberi pekerjaan. Hubungan kerja seperti ini banyak kita lihat di Jepang, Hongkong, dan Taiwan.

MENGEMBANGKAN POTENSI WIRASWASTA MUDA

Kita sering mendengar adanya potensi pada beberapa pemuda untuk menjadi wiraswasta, tetapi terhambat karena tidak adanya modal equity. Walaupun dia memang mempunyai akses pada bank untuk memperoleh kredit, tetapi semua kredit hanya diberikan apabila pengusaha yang membutuhkannya dapat menyediakan sendiri sebagian dari modal yang dibutuhkan dalam bentuk modal sendiri atau modal equity.

Dasar pemikirannya adalah bahwa tidak ada pengusaha yang tidak menanggung risiko. Oleh karena itu, dengan proyek yang sudah dipersiapkan, direncanakan dan dihitung dengan matang, proyek bisa ditangani oleh wiraswasta muda yang tidak mempunyai modal equity. Modal equity disediakan oleh pengusaha besar dan modal pinjaman oleh bank. Wiraswasta diberi tanggung jawab manajemen dengan tingkat gaji yang sangat rendah, tetapi dengan bagian laba yang besar, misalnya 60%. Kepada wiraswasta muda yang akan diorbitkan ini diberikan opsi untuk membeli saham-saham dari perusahaan yang dipimpinnya. Uang yang dipakai untuk membeli saham ini adalah bagian labanya. Maka, bagian labanya tidak boleh dinikmati kecuali untuk membeli saham dari perusahaan yang dipimpinnya dalam rangka hak opsinya. Apabila perusahaan sudah menjadi miliknya, baik seluruhnya maupun sebagian besar (tergantung dari deal-nya semula), barulah dia bisa menikmati dividen.

Apabila dia berhasil memiliki perusahaan dengan konstruksi dan prosedur seperti ini, maka kecuali modal equity, pemilikan ini adalah hasil kerja keras dan hasil kemampuannya berusaha. Apabila dia gagal, pengusaha besar kehilangan modal equity-nya, dan dia kehilangan waktu dan nama baiknya.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku di dalam dunia usaha, wiraswasta muda yang berpotensi ini juga diharuskan menanggung risiko. Karena modal tidak dimilikinya, risiko yang ditanggungnya adalah risiko kehilangan waktu, tenaga, dan nama baik sebagai pengusaha yang mampu.

KEGIATAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN OLEH PENGUSAHA

Sebagai perwujudan dari rasa peka dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya, beberapa pengusaha yang sukses dan kaya kadang-kadang merasa perlu memberikan baktinya dengan mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan/atau pendidikan.

Yayasan semacam ini bisa merupakan gabungan dari banyak pengusaha, sehingga bagi masing-masing pengusaha tidak terasa berat, sedangkan dana

"Cita-cita kita bersama adalah sederhana tetapi agung: suatu masyarakat di mana sekalian golongan (kecuali golongan penjahat) dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain dan bahkan membantu, mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur" (kata Prof.Dr. Harsja W. Bachtiar).

"Dewasa ini terdapat semacam kerinduan akan nasionalisme. Keutuhan dan persatuan bangsa harus kita satukan pengertiannya, dengan lebih terwujudnya rasa senasib dan secita-cita, yang oleh karena itu harus ditumbuhkan melalui peningkatan solidaritas nasional, yang dapat dirasakan gemanya oleh semua orang" (kata Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Sekjen Golkar).

"Pengusaha dan wiraswasta sebenarnya tidak hanya dapat, bahkan seharusnya ikut berperan-serta secara aktif dalam usaha pembentukan bangsa. Mereka harus berusaha membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi 'ekonomi pengetahuan' (*knowledge economy*) melalui pembinaan dunia usaha, yang mereka pimpin dan miliki masing-masing" (kata Dr. Daed Joesoef).

"Terutama bagi Indonesia yang masih dalam tahapan pembangunan, di mana pemerataan belum dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah sepenuhnya secara memadai, dari usahawan dituntut untuk bersadar diri berinisiatif mengembangkan berbagai macam upaya pemerataan menurut kemampuannya masing-masing" (kata Drs. Kwik Kian Gie).

Demikianlah beberapa kutipan untuk memberikan sekedar ide tentang hal yang dipersoalkan. Dalam sanggahan dan diskusi tampil lagi satu baterai pembicara yang pintar-pintar; tidak semua buah pikiran mereka sempat saya catat. Teman-teman sejawat yang berbobot, seperti Jakob Oetama, Fikri Jufri, H. Machbub Djunaidi, tidak ketinggalan angkat bicara. Mendengar nama beberapa sarjana Barat disitir, seperti Ernest Renan, Otto Bauer, Durkheim, Max Weber dan lain sebagainya, sebenarnya saya ingin mengemukakan pandangan seorang putra Indonesia, yaitu Mohammad Hatta, tentang nasionalisme Indonesia.

KE ARAH INDONESIA MERDEKA

Buah pikiran Bung Hatta itu ialah KIM, singkatan dari Kearifan Indonesia Merdeka, yang diterbitkannya dalam sebuah brosur tahun 1932, ketika dia memimpin Pendidikan Nasional Indonesia. Meskipun diutarakan lebih dari setengah abad yang silam, namun diletakkan dalam konteks keadaan sekarang, butir-butir pikiran Bung Hatta itu belum kehilangan aktualitas serta relevansinya. Beberapa kutipan adalah sebagai berikut:

"Kebangsaan ada bermacam-macam, menurut rupa dan warna golongan yang memajukannya. Ada kebangsaan "cap ningrat," ada kebangsaan "cap intelek" dan ada pula kebangsaan "cap rakyat." Riwayat dunia cukup memberi bukti, bahwa ketiga golongan ini ada senantiasa. ... Akan tetapi bukan kebangsaan ningrat dan bukan pula kebangsaan intelek yang dikehendaki oleh Pendidikan Nasional Indonesia, melainkan kebangsaan rakyat. Karena rakyat itu badan dan jiwa bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat itu kita akan turun. ... Kebangsaan itu haruslah dihindangi semangat rakyat, jadinya berdasar kerakyatan. Asas kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*Recht*, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat, kalau ia beralasan kedaulatan rakyat."

Menurut Bung Hatta, yang kemudian menjadi salah satu Bapak Pendiri Republik Indonesia: "Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Perancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak, harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga. ... Kita tidak akan membawa marabahaya Barat itu (kapitalisme) ke tanah air kita. Sebab kedaulatan rakyat yang kita kemukakan harus berlainan dari keadaannya di Barat, harus bersendi kepada sifat kemasyarakatan (*gemeenschap*), yang menjadi tiang persekutuan kita semenjak zaman purbakala."

DEMOKRASI POLITIK DAN EKONOMI

"Sungguhpun kedaulatan rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia berupa baru, sebenarnya ia tidak asing bagi rakyat Indonesia, karena cita-cita ini tersusun di atas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. ... Demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Merdeka.

Pertama: Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindisan yang pelbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarat dan mukafat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Di sini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

Kedua: Cita-cita massa protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau autokrasi yang tersusun di atas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

Ketiga: Cita-cita tolong-menolong. Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas. Kalau seseorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membayar tukang atau menggaji seorang kuli untuk menolong dia, melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang-orang desa. Di sini tersimpan dasar perekonomian berkoperasi. ... Inilah sendi tiga dari demokrasi asli di Indonesia.

Jika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya, yaitu kedaulatan rakyat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia. Di atas sendi yang pertama dan yang kedua dapat didirikan tiang-tiang politik dari demokrasi yang sebenarnya: satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang menjalankannya kekuasaan pemerintahan senantiasa takluk kepada kemauan rakyat.

Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan: hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul. Di atas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang-orang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan."

Bung Hatta mengemukakan buah pikirannya tadi 52 tahun yang lalu. Para pengusaha dan wiraswasta yang ikut sebagai peserta diskusi panel itu, barangkali menganggap pikiran-pikiran Bung Hatta itu sudah ketinggalan zaman. Juga barangkali ada peserta yang menilai, pikiran Bung Hatta tidak pada tempatnya lagi dalam suatu *bureaucratic state* atau *beambtenstaat*. Tetapi mengingat sasaran diskusi panel adalah "mendapatkan pengertian yang jelas tentang konsep nasionalisme dan negara bangsa Indonesia serta peranan dunia usaha dan kewiraswastaan dalam usaha mewujudkan cita-cita negara dan bangsa," saya rasa tidak salah menaruh buah pikiran Bung Hatta sebagai bahan perbandingan dan pelengkap di hadapan para peserta diskusi dalam rangka menyambut peringatan 56 tahun Sumpah Pemuda.